

Nama : Cahyani Nova Safitri

NPM : 2413053181

Kelas : 2F

Artikel Jurnal ini membahas mengenai kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal sebagai Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta. Ahok dituduh melakukan penistaan terhadap Alquran, dan keputusan untuk menuntutnya diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang murni, tanpa adanya tekanan dari publik. Pada tanggal 4 November 2016, terjadi demonstrasi damai yang diikuti oleh mayoritas masyarakat Muslim, yang menuntut agar penegakan hukum dilakukan secara profesional terhadap Ahok. Dalam masalah ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari ketidakadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan.

Artikel ini juga membahas latar belakang sejarah diskriminasi yang dialami oleh komunitas Tionghoa di Indonesia selama masa Orde Baru, di mana mereka berjuang untuk mendapatkan hak-hak sebagai warga negara, termasuk hak politik untuk dipilih dan memilih. Keberhasilan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta menjadi simbol penting bagi komunitas ini, menunjukkan bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam pemerintahan meskipun menghadapi berbagai macam tantangan.

Di dalam artikel dijelaskan beberapa teori perlindungan hukum yang relevan, termasuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi, sedangkan perlindungan represif menangani pelanggaran yang sudah terjadi. Penegakan hukum didefinisikan sebagai usaha yang diambil oleh pemerintah atau otoritas untuk menjamin tercapainya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, melibatkan berbagai penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Profil Ahok diungkapkan dengan jelas, menggambarkan latar belakang pendidikannya di bidang geologi dan kariernya yang dimulai di dunia bisnis sebelum terjun ke politik. Ahok dikenal karena integritasnya dan penolakannya terhadap praktik korupsi, yang membuatnya mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Gaya kepemimpinan Ahok yang tegas dan langsung sangat cocok untuk menghadapi berbagai tantangan di Jakarta, yang merupakan miniatur Indonesia dengan beragam suku, ras, dan agama. Meskipun tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya cukup tinggi, gaya kepemimpinannya juga menuai kritik dan protes, terutama dari kelompok-kelompok yang menolak keberadaannya sebagai pemimpin non-Muslim.

Penegakan hukum di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Artikel ini menekankan bahwa

penegakan hukum harus dilakukan dengan adil dan transparan untuk menjaga kewibawaan negara di mata rakyat. Dapat disimpulkan bahwa masalah penegakan hukum di Indonesia adalah isu yang sangat serius dan memerlukan perhatian dari pemerintah. Reformasi hukum yang terus-menerus diperlukan untuk mengatasi masalah korupsi, ketidakadilan, dan untuk memastikan perlindungan hak-hak setiap warga negara, sehingga negara dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat.